

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI (PNPM-M) DI
KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA**
(Studi Komparatif Antara Kelurahan Sotek Dan Kelurahan Nipah-Nipah)

Muhammad Abu Amir ¹

Abstrak

Muhammad Abu Amir, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 tahun 2011 Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Komparatif antara kelurahan sotek dengan kelurahan nipah-nipah), di bawah bimbingan bapak Drs. H. Muhammad Noor, M.Si dan bapak Budiman, S.IP, M.Si

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 tahun 2011 Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Komparatif antara kelurahan sotek dengan kelurahan nipah-nipah) dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 tahun 2011 Tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M) di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Komparatif antara kelurahan sotek dengan kelurahan nipah-nipah).

Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam implementasinya kelurahan sotek dan kelurahan nipah-nipah pada dasarnya telah benar dalam melaksanakan kegiatan PNPM-Mandiri hasil penelitian menunjukkan bahwa kelurahan sotek lebih baik dari kelurahan nipah-nipah dalam pelaksanaannya. Meskipun dalam proses selanjutnya masih terdapat beberapa hal yang belum mampu disempurnakan oleh pihak UPK PNPM-Mandiri sendiri serta aparat kelurahan dan jajarannya kepada masyarakat selaku subjek dan objek dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri.

Kata Kunci : *Implementasi Peraturan Menteri, PNPM-M, Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Komparatif, Kelurahan Sotek, Kelurahan Nipah-Nipah)*

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: abduhc10@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Publik merupakan salah satu pekerjaan sosial yang telah dilakukan oleh pemerintah, namun pembangunan yang berorientasi perspektif pertumbuhan yang dikombinasikan dengan kebijakan yang berorientasi stabilitas kekuasaan telah melahirkan pelaksanaan pembangunan yang sentralistik dan *top down*. Dalam pelaksanaannya kebijakan sosial juga telah melahirkan dominasi Negara di satu pihak dan marginalisasi masyarakat dipihak lain, terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan, Walaupun secara makro kebijakan ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi secara mikro ternyata kurang menyentuh peningkatan taraf hidup lapisan bawah, bahkan menimbulkan kesenjangan, hal tersebut dilihat sebagai akibat dari hasil pembangunan yang kurang menyentuh kepentingan masyarakat pada tingkat bawah, Hal itu merupakan akibat dari marginalisasi masyarakat sehingga menciptakan kelompok lemah dan ketidak berdayaan yaitu kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi dalam suatu masyarakat, seperti masyarakat kelas ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, wanita, populasi lanjut usia, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, serta masyarakat pada daerah tepencil adalah orang-orang yang mengalami ketidak berdayaan. Ketidak berdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam arena politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan financial, ketiadaan pelatihan-pelatihan, dan adanya ketegangan fisik dan emosional.

Namun oleh karena penyebab marginalisasi masyarakat yang menjadi sumber masalah tidak terangkatnya masyarakat lapisan bawah adalah faktor utama ketidak berdayaan maka pendekatan yang kemudian banyak digunakan oleh perspektif ini adalah pemberdayaan masyarakat, Ketidak berdayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk kurangnya wewenang masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kurangnya kapasitas untuk mengelola pembangunan secara mandiri, Dengan demikian dua unsur penting dalam pemberdayaan adalah desentralisasi dan pengembangan kapasitas, Keduanya merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi PNPM MP di kelurahan Sotek dan di Kelurahan Nipah-Nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara ?
2. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi PNPM MP pada dua kelurahan tersebut ?

Tujuan yang dikemukakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi PNPM MP di kelurahan sotek dan kelurahan nipah-nipah Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi PNPM MP pada dua kelurahan tersebut.

Manfaat yang bisa dikemukakan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis bahwa hasil penelitian yang di lakukan di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah terhadap masalah kemiskinan.
2. Secara praktis, Sebagai informasi bagi aparat pemerintah yang berkaitan terhadap pembangunan.
3. Memberikan masukan positif bagi peneliti agar dapat di jadikan bahan evaluasi bagi peneliti untuk kegiatan selanjutnya.

Kerangka Dasar Teori

Implementasi Kebijakan

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Dengan mengacu pada pendapat tersebut, dapat diambil pengertian bahwa Implementasi Kebijakan adalah sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan, di dalamnya mencakup: manusia, dana, dan kemampuan organisasi, yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun swasta (individu ataupun kelompok).

Tahap-Tahap Implementasi Kebijakan

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solihin Abdul Wahab 1991 : 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut :

Tahap I : Terdiri atas kegiatan-kegiatan :

- a) Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas ;
- b) Menentukan standar pelaksanaan ;
- c) Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III : Merupakan kegiatan-kegiatan :

- a) Menentukan jadwal ;
- b) Melakukan pemantauan ;
- c) Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Program

Program menurut Gittinger (1972) dalam Ginanjar Kartasamita (1996:30) bahwa “program pada dasarnya adalah kumpulan kegiatan yang dapat di himpun dalam suatu kelompok yang sama secara sendiri-sendiri / bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilakukan melalui upaya sistematis yang diorganisasikan dalam unit yang disebut proyek. Proyek ini dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan investasi yang menggunakan faktor produksi yang menghasilkan barang dan jasa”. Program merupakan perencanaan mengenai asas-asas dan usaha. Akan tetapi, suatu program tidak dapat terlepas dari yang namanya implementasi kebijakan karena suatu kebijakan yang di buat oleh pemerintah atau swasta yang berbentuk program, baik itu program penanggulangan kemiskinan ataupun program lainnya haruslah memperhatikan hal-hal yang dapat menentukan tingkat keberhasilan program tersebut dan program tidak akan berjalan lancar sesuai dengan yang di inginkan bila tidak di implementasikan dengan baik dan tidak tepat sasaran dari pada tujuan di buatnya program tersebut, apabila suatu program di buat tidak memperhatikan hal-hal tersebut maka akan mengakibatkan pemborosan dan kesia-siaan karena program tersebut tidak di terima oleh masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, umumnya Eropa. Untuk konsep pemberdayaan secara tepat dan jernih memerlukan upaya pemahaman latar belakang konseptual yang melahirkannya, sebelum penulis membahas mengenai apa itu pemberdayaan. Adapun kata dasar dari pemberdayaan adalah “daya” yang berarti kesanggupan untuk berbuat, melakukan kegiatan upaya, usaha, dan ikhtiar.

Lahir dan berkembangnya konsep pemberdayaan memerlukan sikap dan wawasan yang mendasar, jernih serta kuat mengenai kekuasaan atau power itu sendiri. Kerancuan yang menyertai perkembangan konsep pemberdayaan itu tidak saja disebabkan oleh adanya berbagai versi dan bentuk pemberdayaan (ada yang radikal, ada yang relatif) akan tetapi juga disebabkan karena tumbuh dan berkembangnya konsep pemberdayaan tersebut tidak disertai dengan terjadinya refleksi mendasar secara jernih dan kritis terhadap konsep kekuasaan atau power itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut Siagian (2002 : 258) mengemukakan konsep pemberdayaan dengan versi yang berbeda adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab yang besar.
2. Dilibatkan dalam pengambilan keputusan bukan hanya tugas serta jabatan akan tetapi meliputi kehidupan orang pada umumnya.
3. Melakukan pekerjaan yang menarik, menantang dengan identitas yang jelas.

4. Adanya kebebasan bertindak, menyusun rencana, menyusun jadwal, penyelesaian pekerjaan serta menentukan sendiri solusi permasalahan yang di hadapi.
5. Kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, mempunyai kemampuan operasional.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri) adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan oelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemeberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan system serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Dengan tujuan sebagai berikut :

1) Tujuan Umum

Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

2) Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa (BKAD).
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah: (1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya; (2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif; (3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal; (4) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat; (5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Komponen Program PNPM.-Mandiri

Rangkaian proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui komponen program sebagai berikut :

a. Pengembangan Masyarakat.

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintah dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok peduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak, misal seminar.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Sasaran PNPM-Mandiri

Lokasi Sasaran

Ketentuan pemilihan lokasi sasaran berdasarkan ketentuan :

- a. Kecamatan-kecamatan yang tidak termasuk kategori “kecamatan bermasalah dalam PPK,”
- b. Kecamatan-kecamatan yang diusulkan oleh pemerintahan daerah dalam skema *kontribusi pendanaan*.

Kelompok Sasaran

- a. Rumah Tangga Miskin (RTM) di perdesaan,
- b. Kelembagaan masyarakat di perdesaan,
- c. Kelembagaan pemerintahan lokal.

Pendanaan

Sumber dan Ketentuan Alokasi Dana BLM PNPM-Mandiri

Sumber dana berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 60% (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 40% (APBD)
- c. Swadaya masyarakat

d. Partisipasi dunia usaha

Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan adalah sbb:

- a. Berdasarkan penetapan lokasi kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan (Depkeu) menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi
- b. Alokasi dana PNPM Mandiri Perdesaan dicatat pada Daftar Pembukuan Administrasi APBD Kabupaten

Mekanisme penyaluran dana

- a. Penyaluran dana yang berasal dari pemerintah pusat mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran, Depkeu.
- b. Penyaluran dana yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan melalui mekanisme APBD dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Depkeu
- c. Dana yang berasal dari APBD harus disalurkan terlebih dahulu ke masyarakat, selanjutnya diikuti dengan penyaluran dana yang berasal dari APBN
- d. Besaran dana dari APBD yang disalurkan ke masyarakat harus utuh (net) tidak termasuk pajak, retribusi atau biaya lainnya

Mekanisme pencairan dana

- a. Pembuatan surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara UPK dengan TPK
- b. TPK menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain, RAB, dan lampirannya)
- c. Untuk pencairan berikutnya dilengkapi dengan Laporan Penggunaan Dana (LPD) sebelumnya dan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah

Dana operasional UPK dan pelaksana di desa

Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/ desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan.

Mekanisme usulan kegiatan

Setiap desa dapat mengajukan 3 (tiga) usulan untuk dapat didanai dengan BLM PNPM Mandiri Perdesaan. Setiap usulan harus merupakan 1 (satu) jenis kegiatan/ satu paket kegiatan yang secara langsung saling berkaitan.

Tiga usulan dimaksud adalah:

- a. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar atau kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) atau peningkatan kapasitas/

ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan.

- b. Usulan kegiatan simpan pinjam bagi Kelompok Perempuan (SPP) yang ditetapkan oleh musyawarah desa khusus perempuan. Alokasi dana kegiatan SPP ini maksimal 25% dari BLM kecamatan. Tidak ada batasan alokasi maksimal per desa namun harus mempertimbangkan hasil verifikasi kelayakan kelompok.
- c. Usulan kegiatan sarana prasarana dasar, kegiatan peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan atau pendidikan) dan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi yang ditetapkan oleh musyawarah desa perencanaan.

Ketentuan Dasar PNPM-Mandiri

Ketentuan dasar PNPM Mandiri Perdesaan meliputi :

a. Desa Berpartisipasi

Seluruh desa di kecamatan penerima PNPM Mandiri Perdesaan berhak berpartisipasi dalam seluruh tahapan program. Namun, untuk kecamatan - kecamatan yang pemilihan maupun penentuan besarnya BLM didasarkan pada adanya desa tertinggal, maka kegiatan yang diusulkan oleh desa-desa tertinggal akan mendapat prioritas didanai

b. Kriteria dan Jenis Kegiatan

Kegiatan yang akan dibiayai melalui dana BLM diutamakan untuk kegiatan yang memenuhi kriteria:

- a. lebih bermanfaat bagi RIM, baik di lokasi desa tertinggal maupun bukan desa tertinggal
- b. berdampak langsung dalam peningkatan kesejahteraan
- c. dapat dikerjakan oleh masyarakat
- d. didukung oleh sumber daya yang ada
- e. memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan

Jenis-jenis kegiatan yang dibiayai melalui BLM PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut :

- a. pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi RIM,
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat (pendidikan nonformal)
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal (tidak termasuk penambahan modal)
- d. Penambahan permodalan simpan pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP).

c. Swadaya Masyarakat

Swadaya adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki terhadap program.Swadaya

masyarakat merupakan salah satu wujud partisipasi dalam pelaksanaan tahapan PNPM Mandiri Perdesaan. Swadaya bisa diwujudkan dengan menyumbangkan tenaga, dana, maupun material pada saat pelaksanaan kegiatan.

d. Kesetaraan dan Keadilan Gender

Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan pemihakan kepada perempuan. Sebagai salah satu wujud keberpihakan kepada perempuan, PNPM Mandiri Perdesaan mengharuskan adanya keterlibatan perempuan sebagai pengambil keputusan dan pelaku pada semua tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kepentingan perempuan harus terwakili secara memadai.

e. Jenis Kegiatan yang Dilarang (Negative List)

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer, kegiatan politik
- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah
- c. Pembelian *chainsaw*, senjata, bahan peledak, asbes dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan
- d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya
- e. Pembiayaan gaji pegawai negeri
- f. Pembiayaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak di bawah usia kerja
- g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau
- h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut
- i. Kegiatan pengolahan tambang dan penggunaan terumbu karang
- j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain
- k. Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai
- l. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luasnya lebih dari 50 Hektar (Ha)
- m. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha
- n. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

f. Sanksi

Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Sanksi dapat berupa :

- a. Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat,
- b. Sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku,
- c. Sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perdesaan dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang.

g. Pendampingan Masyarakat dan Pemerintahan Lokal

Masyarakat dan pemerintahan lokal dalam melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan mendapatkan pendampingan dari fasilitator. Fasilitator yang akan mendampingi masyarakat dan pemerintahan lokal adalah sebagai berikut:

- a. Di setiap kecamatan disediakan Fasilitator Kecamatan (F-Kec) dan Fasilitator Teknik Kecamatan (FT-Kec)
- b. Di setiap kabupaten disediakan Fasilitator Kabupaten (F-Kab), dan Fasilitator Teknik Kabupaten (FT-Kab)

Metode Penelitian

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiono (2010 : 292) bahwa pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas, holistic, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data data pada situasi social tersebut di jaring dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrument seperti test, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi social secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori.

Berdasarkan pemahaman tersebut , karena penelitian ini bersifat deskriptif maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif

Fokus Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka diperoleh fokus penelitian yang penulis tetapkan agar dapat memberikan batasan studi pada fokus penelitian yang akan diteliti,

Fokus penelitian yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan PNPM-Mandiri di Kecamatan Penajam
 - a. Pembangunan Prasarana Umum tahun 2013 di Kelurahan Sotek dan Kelurahan Nipah-nipah
 - b. Pembangunan di bidang Sarana Ekonomi bantuan dana bergulir spp di Kelurahan Sotek dan Kelurahan Nipah-nipah

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

Jenis dan Sumber Data

Menurut Suharsini Arikunto (1997 : 114), bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dari pengertian diatas dapat di bagi menjadi dua jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain :

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui informan dengan cara melakukan tanya-jawab secara langsung dan di pandu melalui pedoman wawancara sesuai dengan indikator-indikator yang penulis teliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber informasi antara lain melalui :
 - a. Dokumen-dokumen, laporan hasil evaluasi.
 - b. Buku-buku referensi, hasil penelitian dan media massa serta elektronik yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan ini untuk memperoleh data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa cara penelitian yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Adalah dengan cara mengkaji serta mempelajari data pendukung dari kepustakaan, referensi buku literatur dan bahan tulisan lainnya.

2. Penelitian lapangan (*Field Work Research*)

Adalah cara pengumpulan data, informasi, bahan-bahan secara langsung kelapangan di lokasi penelitian. Adapun cara pengumpulan data di lapangan digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung keobjek atau tempat penelitian.
- b) Wawancara mendalam (*Indept Interview*) yaitu suatu proses tanya jawab secara lisan dan secara langsung antara *observer* dengan informan yang diarahkan pada masalah tertentu secara mendalam.
- c) Dokumentasi, Dokumentasi dalam kamus besar bahasa Indonesia didefenisikan sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.

Hasil Penelitian

Kelurahan Sotek : Pelaksanaan Program Pembangunan Prasarana Umum merupakan salah satu pembangunan yang berasal dari kelompok campuran (laki-laki dan perempuan) yang diusulkan masyarakat melalui PNPM-Mandiri di bidang infrastuktur / prasarana umum. Usulan Kelurahan Sotek melalui PNPM-Mandiri di bidang Infrastruktur/Prasarana umum adalah peningkatan jalan lingkungan di RT 11 berupa semenisasi saluran air/ parit dan gorong-gorong di Kelurahan Sotek tahun anggaran 2013 dan pengerjaannya di tahun 2014. Adapun tujuan daripada pembangunan tersebut adalah untuk

meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan cara memperlancar arus transportasi dari jalan utama menuju jalan daerah penghasil perkebunan, serta mengurangi genangan air yang dapat berakibat banjir jika hujan besar.

Kelurahan Nipah-Nipah : Sementara untuk Kegiatan PNPM-MP berupa Pembangunan Prasarana Umum di Kelurahan Nipah-nipah untuk tahun 2013 tidak terlaksana, karena tidak sedang menerima aliran dana PNPM-Mandiri, hal ini di karenakan usulan yang di ajukan tidak termasuk dalam kategori prioritas usulan, sehingga tidak ada kegiatan pembangunan prasarana umum, tapi untuk Sarana Ekonomi berupa kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) Kelurahan Nipah-nipah tetap akan memperoleh dana perguliran.

Pembangunan dibidang Ekonomi (SPP)

Sesuai judul penelitian, maka peneliti akan mencoba berusaha memaparkan dua obyek kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan yaitu di kelurahan Sotek dan kelurahan Nipah-nipah. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pinjaman modal usaha untuk kelompok perempuan. Kegiatan ini merupakan salah satu usulan dari kelompok perempuan dari dua usulan yang diajukan dari kelompok perempuan.

Kegiatan dalam pelaksanaan kegiatan simpan pinjam khusus kelompok perempuan (SPP) di Kelurahan Sotek dan Kelurahan Nipah-nipah melalui PNPM-Mandiri sudah berjalan sejak tiga tahun yakni pada tahun anggaran 2011,2012 dan 2013 serta untuk tahun anggaran 2014 kelompok perempuan dari Kelurahan Sotek dan kelurahan Nipah-nipah masih bisa mengusulkan pinjaman modal melalui PNPM-Mandiri akan tetapi belum terdanai karena masih menunggu kelompok dari desa/kelurahan lain yang sudah terdanai untuk melunasi pinjamannya. Khusus buat kelompok perempuan di kelurahan nipah-nipah pinjaman modal untuk tahun anggaran 2014 tetap bisa mengusulkan hanya di nilai masih banyaknya tunggakan-tunggakan dalam pengembalian dana pinjaman sehingga akan mempengaruhi besaran jumlah nilai pinjaman modal dari PNPM-Mandiri Kec. Penajam.

Faktor - Faktor Pendukung dan Hambatan-hambatan yang di hadapi dalam Implementasi PNPM-Mandiri di Kecamatan penajam (Kelurahan Sotek dan Kelurahan Nipah-nipah)

Faktor Pendukung

terdapat tiga (3) faktor pendukung dalam pelaksanaan PNPM-Mandiri di kecamatan penajam (kelurahan sotek dan kelurahan nipah-nipah) yaitu :

- 1 Adanya forum Musyawarah Antar Desa (MAD),menurut penulis hal tersebut menjadi sebuah alat untuk mengakomodir semua usulan dari setiap perwakilan desa/ kelurahan.
- 2 Sumber dana adalah sumber pendanaan yang bersumber dari BLM PNPM-MP yang mana maksimal nilai satu usulan kegiatan yang dapat didanai BLM PNPM-MP adalah di bawah Rp 350 juta.

- 3 Sumber daya manusia (SDM), adalah kemampuan dari setiap kelompok peminjam baik campuran maupun kelompok simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dalam mengelola dana pinjaman menjadi bermanfaat bagi hajat hidup orang banyak.

Hambatan

Terdapat 2 faktor penghambat dalam implementasikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kelurahan Sotek dan Kelurahan Nipah-nipah, yaitu :

1. Faktor internal

Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang menghambat dalam pengimplementasian PNPM-Mandiri di kec. Penajam khusus kelurahan sotek dan kelurahan nipah-nipah, karena SDM yang ada masih belum mampu optimal dalam menjalankan tugas-tugas program kegiatan yang ada sehingga terjadi pelimpahan wewenang tugas dan dan fungsi (tupoksi) bagi pelaku PNPM-Mandiri yang ada di kelurahan sotek dan kelurahan nipah-nipah.

2. Faktor eksternal

Faktor Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengimplementasian PNPM-Mandiri di kelurahan sotek dan kelurahan nipah-nipah, hal ini disebabkan karena kurangnya partisipasi masyarakat yang di tandai dengan absennya masyarakat dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan melalui PNPM-Mandiri.

Kesimpulan

Berdasarkan penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan PNPM-Mandiri di kecamatan penajam
 - a. Dalam proses implementasinya khusus pembangunan prasarana umum tahun 2013, kelurahan sotek telah melaksanakan kegiatan PNPM-Mandiri dibidang prasarana umum yaitu peningkatan jalan lingkungan berupa semenisasi parit/drainase jalan dengan panjang 534 m dan lebar 3,2 m. Sementara kelurahan nipah-nipah untuk tahun 2013 sedang tidak melaksanakan kegiatan PNPM-MP di bidang prasarana umum, hal ini dikarenakan usulan yang di ajukan tidak masuk dalam daftar prioritas usulan.
 - b. Sarana Ekonomi, Untuk bantuan dana bergulir Kelurahan sotek ada empat (4) kelompok yaitu bunga melati, usaha maju, meranti baru dan angrek 2. Sementara Kelurahan Nipah-nipah hanya di wakili oleh 1 kelompok yaitu Kelompok Melati. Sebenarnya masih ada beberapa kelompok di kelurahan nipah-nipah namun

- bermasalah karena tunggakan, sehingga tidak bisa diberi pinjaman sampai pinjaman sebelumnya dikembalikan.
2. Dalam proses pelaksanaannya terdapat juga beberapa faktor penghambat dan pendukung dalam pencapaiannya. Berikut adalah faktor-faktor pendukung dan hambatan :
 - a. Faktor Pendukung
 - Adanya forum Musyawarah Antar Desa (MAD) sebagai sarana pengajuan usulan program bagi setiap desa/kelurahan
 - Adanya Sumber Dana yang cukup sebagai langkah nyata realisasi program.
 - Adanya SDM yang mumpuni sebagai penggerak pengelolaan pendanaan menjadi bermanfaat bagi hajat hidup masyarakat.
 - b. Hambatan :
 - Faktor Internal yaitu Kurangnya ketrampilan/ keahlian dari TPU (tim penulis usulan) dalam hal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian kurangnya koordinasi serta komunikasi antar staf UPK PNPM-Mandiri dengan aparat kelurahan.
 - Faktor Eksternal/ Partisipasi masyarakat yaitu Adanya kejenuhan dari masyarakat untuk mengikuti rapat perencanaan (musyawarah) PNPM-Mandiri.

Saran-Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang dikemukakan diatas, penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Komunikasi antara PNPM-MP Kecamatan dengan PNPM-MP desa/kelurahan lebih ditingkatkan, dan harus lebih giat dalam melaksanakan sosialisasi tentang sanksi dalam penyalahgunaan dana pinjaman yang bersumber dari PNPM-MP. Di harapkan masyarakat akan lebih berhati-hati dan bijaksana dalam mengelola dana hasil pinjaman tersebut agar terhindar dari sanksi tersebut.
2. Pelaku PNPM-Mandiri khususnya TPU,TPK, dan TP agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan bidangnya agar tidak terjadi pelimpahan tugas dan tanggung jawab, serta dapat meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama antar anggota masyarakat dengan cara meningkatkan kepedulian masyarakat akan keadaan di sekitar dan turut berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan PNPM-Mandiri terutama dalam menghadiri musdes dan pelaksanaan kegiatan serta dalam menjaga dan merawat hasil daripada kegiatan PNPM-Mandiri itu sendiri.
3. Kepada para pelaku PNPM-MP kecamatan agar lebih giat lagi dalam mengajak serta masyarakat untuk turut berperan didalam proses menyejahterakan masyarakat secara umum, hal tersebut bisa dilakukan dengan menciptakan sesuatu yang dapat memancing/ menumbuhkan kembali

minat serta masyarakat untuk lebih peduli dan aktif dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh PNPM-MP.

Daftar Pustaka

- Wrihatnolo, Randy R dan Dwidjowijoto Riant Nugroho. (2007). *Manajemen Pemberdayaan : Sebuah Pengantar dan Perpaduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Wahab, Solichin Abdul (1991). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul (1994). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Subarsono, A.G. (2006). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsini. 1997. *Prosedur Penelitian (edisi revisi): Suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Renika Cipta
- Siagian, Sondang P. (2002). *Administrasi pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Kartasamita, Ginanjar (1996). *Administrasi pembangunan, Perkembangan Ekonomi dan Prakteknya di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Suharto, Edi (2005). *Membangun Masyarakat Memperdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007/Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM MANDIRI)
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Sugiono. 2007. *Memahami penelitian Kualitatif*, Bandung. CV. Alfabeta.
- Miles, Methew B. Dan A. Michael Huberman, 2007. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UI-Press: Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri. 2008. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan*, Tim Pengendali PNPM Mandiri Perdesaan.
- Petunjuk Teknis Oprasional Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2010*.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125
- Permendagri. 2011. *Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 2011 (Salinan)*
- <http://www.pnpm-mandiri.org/> (09-10-2012)
- <http://www.penajamkab/> (09-10-2012)
- <http://www.bps.go.id/> (10-10-2012)
- http://www.depsos.go.id (20-11-2013)